BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut masyarakat lebih tanggap dan kritis terhadap perubahan atas peran aparatur pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan. Reformasi sektor publik telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang jujur, profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pemerintah termasuk pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Tugas pokok pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik intern birokrasi, maupun masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah, atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah.

Terselenggaranya Otonomi Daerah di Indonesia dihadapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan

kehidupan yang berdemokrasi, dan keadilan dengan adanya keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) serta efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan pada semua elemen pemerintah. Otonomi daerah di Indonesia yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kebijakannya dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom.

Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sistem penganggaran di Indonesia pada era desentralisasi telah mengalami beberapa perubahan. Sistem anggaran juga kini mengacu pada anggaran berbasis kinerja yang diharapkan bisa lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran, baik membangun anggaran yang lebih efektif dan efisien maupun mendorong akuntabilitas pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya. Anggaran pemerintah memegang peran penting karena anggaran merupakan wujud membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan

keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan Anggaran Daerah, khususnya masalah penganggaran.

Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, nampaknya berusaha menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 bahwa Anggaran Daerah disusun berdasarkan anggaran kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Kualitas anggaran publik tercapai apabila: (1) pengeluaran negara dilakukan secara efisien dan efektif; (2) akuntabilitas keuangan publik meningkat; (3) tercapai transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Untuk mencapai kualitas anggaran, perlu diperoleh informasi dan fakta kinerja sebagai alat yang digunakan dalam penetapan pengelolaan anggaran.

Penerapan anggaran berbasis kinerja, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyempurnaan pengendalian keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Hal yang terpenting dalam penyempurnaan pengendalian keuangan adalah adanya kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola program dan kegiatan yang ada.

Dalam Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintahan, keberhasilan kerja yang dilaksanakan oleh aparatur atau beberapa

satuan kerja sebagai bagian dalam pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya yang baik yaitu aparatur yang dianggap memiliki kemampuan serta sistem informasi sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*). Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran serta diperlukannya indikator kerja, standar biaya dan evaluasi kinerja aparatur dari setiap program.

Salah satu daerah yang menjadi sorotan menurunnya kinerja pemerintah terjadi di Kota Bandung. Disampaikan oleh ketua DPRD Kota Bandung, Erwan Setiawan yang meminta Wali Kota Bandung untuk mengevaluasi kinerja para Kepala SKPD. Untuk tidak sungkan menghentikan pejabat yang kualitas kinerjanya tidak bagus. Permintaan Ketua DPRD Kota Bandung bukan tanpa alasan karena sering kali mendapat pengaduan tentang pejabat yang kinerjanya tidak memuaskan. Banyaknya kerjasama yang kurang bagus dengan anggota legislatif, misalnya tidak menghadiri undangan DPRD. Menurutnya, bagaimana bisa mengajukan anggaran kalau saat diundang untuk membahas anggaran tidak hadir. Ketua DPRD Kota Bandung pun menyoroti penerapan anggaran APBD Kota Bandung tahun 2013 yang baru 50%. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena mengganggu kinerja dan pelayanan terhadap warga Kota Bandung. Semangat baru yang dicanangkan Wali Kota Bandung, maka sudah selayaknya mendapat dukungan dari SKPD yang memiliki semangat baru juga, karena jika tidak harapan yang dicanangkan tidak akan teraksana. (Galamedia, 7 Oktober 2013)

Menjelang tahun baru 2015, sejumlah pekerjaan rumah masih harus diselesaikan Pemkot Bandung. Salah satunya pengerjaan trotoar granit di Jln. Braga dan Riau yang belum juga rampung. Selain itu, reformasi birokrasi pun harus terus dibenahi karena saat ini masih ada pimpinan di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang masih ABS (asal bapak senang). "Di tahun 2014 ini masih ada pengerjaan yang tertunda, seperti proyek pengerjaan trotoar granit yang belum beres. Ini harus jadi catatan agar proyek pembangunan kedepan tidak menghadapi kendala seperti ini," ujar anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Erwan Setiawan di GOR Pajajaran, Jln. Pajajaran, Sabtu (27/12/2014). Erwan menilai lebih baik pembangunan saluran dan trotoar granit di Jln. Braga dan Jln. R. E. Martadinata ini diambil alih pemkot Bandung. Kemudian sanksi tegas harus diberikan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. "Pemkot harus tegas, kontraktornya jangan diikutsertakan lagi dalam pengerjaan proyek-proyek," ungkapnya. Selain itu, Erwan pun menilai mentalitas pimpinan SKPD harus ditingkatkan karena masih ada yang bersikap ABS. Menurutnya, banyak pejabat yang hanya menerima laporan dan tidak langsung mengecek ke lapangan. "Kalau dapat laporan harus cek benar atau tidaknya, pejabat harus mau turun ke lapangan," tegasnya. (Galamedia, 27 Desember 2014)

Warga pun kecewa dengan kinerja Pemda Kabupaten Bandung Barat yang tak serius dalam upaya penataan kawasan Lembang. Jalan penghubung antar Desa Jayuambon dengan Desa Cibogo, Kecamatan Lembang yang amblas sejak sebulan lalu hingga kini tak kunjung diperbaiki. Jalan Pangragajian sangat vital karena kerap menjadi jalur alternatif saat kawasan Pasar Panorama macet total.

Banyaknya kendaraan yang melintas tak diiringi dengan kualitas jalan yang memadai. Jalan di kampung Pangragajian memang sudah lama rusak akibat buruknya drainase di kawasan Lembang. Proyek pembetonan pun terkesan serampangan dan terlihat tidak tuntas. Parit kecil yang merupakan sumber penyebab rusaknya jalan hingga kini tak diperbaiki. "Memang ini jalan vital tapi tak dapat perhatian. Sudah tiga tahun warga meminta perbaikan, tapi baru Desember kemarin dilakukan, hasilnya juga begini tidak total," kata Bagja (40), salah seorang pemilik warung. (Galamedia, 16 Januari 2015)

Walaupun operasi pasar beras sudah dilaksanakan pemerintah daerah bekerjasama dengan Perum Bulog, namun harga beras di pasaran masih melambung dan dikeluhkan masyarakat. Yaitu pada kisaran Rp 11.000-Rp 12.500/kg. "Saat kami bertanya ke Kepala Divisi Regional Bandung, operasi pasar beras sudah selesai dan dilaksanakan. Tapi belum ada perubahan dan berdampak terhadap penurunan harga beras," kata Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., kepada galamedianews.com disela-sela menghadiri acara "Mujahadah Maulid dan PKB Berbagi" di Desa./Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Minggu (1/3/2015). Wakil Ketua Fraksi PKB ini mengatakan, harga beras masih melambung dan dikeluhkan masyarakat luas. Cucun menilai kenaikan harga beras ini diduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan disaat kondisi menjelang panen raya. "Mereka mencari keuntungan sebesar-besarnya," katanya. Cucun menegaskan jika Perum Bulog tak bisa menangani stabilitas harga beras dan pangan di Indonesia (pasaran), Komisi IV DPR RI pun turut mempertanyakan kinerja Perum Bulog. "Kalau enggak

sanggup bubarkan saja Bulog. Kalau enggak sanggup ngapain mereka tetap bertahan," cetusnya. Terkait dengan adanya kenaikan harga beras, kata Cucun, Komisi IV DPR RI juga akan terus melakukan pengecekan ke gudang Bulog untuk melihat stok beras yang disimpan cukup lama. "Kenapa raskin distok cukup lama di gudang Bulog? Akibatnya, kualitas beras menurun, seperti bau apek, mengandung kutu dan warnanya ke kuning-kuningan, sehingga dikeluhkan masyarakat luas," katanya. Cucun juga akan berkoordinasi dengan sesama anggota dewan untuk merubah aturan dalam penyaluran bantuan beras kepada masyarakat. "Caranya, bisa dengan cara pemerintah menyalurkan bantuan uang tunai ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan syarat yang memiliki kartu raskin," kata Cucun. (Galamedia, 1 Maret 2015)

Banyaknya target program kerja Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan tidak tercapai bahkan dinilai gagal, menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, H. Teuku Hanibal, S.E. perlu ada penjelasan pemerintah daerah. Menurutnya, target-target yang tidak tercapai ini perlu penjelasan, karena dasar untuk mencapai kinerja gubernur itu adalah RPJMD. "Ketidakberhasilan ini akan menjadi catatan bagi anggota Pansus dari Fraksi PPP dalam menyikapi LKPJ Gubernur Jawa Barat di tahun 2014. Kita tentu akan meminta klarifikasi atau keterangan dari Gubernur," kata pria yang akrab disapa Iqbal ini di Bandung, Kamis (19/3). Iqbal menegaskan, ketidakberhasilan gubernur dalam kinerjanya selama tahun 2014 adalah dalam hal tingkat partisipasi angkatan kerja. Pemerintah Daerah membuat target untuk tingkat partisipasi angkatan kerja ini sebesar 64-65%. Namun kenyataannya, capaian yang diperoleh hanya sebesar 62,7%. Bahkan tingkat

pengangguran terbuka pun 8,5%, lebih kecil dari target yang ditetapkan yakni sebesar 8,5%. Indikator lain yang tidak tercapai itu adalah angka kemiskinan. Pada tahun 2014, angka kemiskinan sebesar 9,18%. Sedangkan targetnya, kata Iqbal, sebesar 7,8-6,8%. "Itu masih jauh dari target yang ditetapkan untuk menekan angka kemiskinan ini, kita sangat menyayangkan itu," tandas Iqbal. (Galamedia, 19 Maret 2015)

Tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum menunjukkan peningkatan positif. Kebiasaan buruk seperti, pulang sebelum waktunya masih berlangsung hingga kini. Hal tersebut diakui Asisten III Bidang Administrasi dan Umum KBB, Maman Sulaeman, Minggu (26/4/2015). Menurut Maman, persoalan kehadiran seharusnya menjadi tanggung jawab kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kepala dinas. Peralnya, pemantauan kinerja dan kehadiran pegawai lebih mudah diamati di tiap dinas masing-masing. Bahkan secara tegas dia menyebut, beberapa PNS tak mau terbelit aturan. Sebagai contoh, lanjut Maman, banyak pegawai yang terlihat keluar kantor lewat jendela. Padahal pintu sudah tersedia. "Saya tak menampik karena kita keterbatasan. Keinginannya (pegawai) enak saja, gak ada upaya, ini persoalan mentalitas," ungkap Maman. Fakta lain, sambungnya, dari 1.168 PNS yang wajib apel, hingga hampir delapan tahun KBB berdiri, jumlah tersebut tak pernah terpenuhi. "Belum pernah hadir semua apel. Itu mustahil, karena beberapa halangan, ada yang sakit, rapat di luar, itu tercatat pemberitahuan, ada juga yang bolos," ujarnya. Sebetulnya upaya Pemda KBB dalam menyelesaikan persoalan mental pegawai sudah dilakukan. Salah satunya dengan diberlakukan absensi finger print. Namun

hal itu tak menyurutkan 'sifat nakal' pegawai. "Sekali tidak hadir atau terlambat itu TPP dipotong 4%. Finger Print itu jaminan pegawai untuk mencairkan TPP, bukan untuk gaya-gayaan. Eh ada saja yang lolos. Bahkan ada Finger Print yang ujung-ujung rusak. Makannya seharusnya kehadiran pegawai jadi tanggung jawab kepala dinas," paparnya. Dengan kondisi tersebut, tindakan tegas pun mulai dilakukan. Maman mengaku ada beberapa pegawai yang diturunkan pangkatnya karena sejumlah persoalan. "Kita ingin merubah karakter malas. Banyak yang diturunkan pangkat, sesuai dengan PP 53 2010 tentang Disiplin pegawai," katanya. (Galamedia, 26 April 2015)

Pemerintah daerah dinilai perlu meningkatkan kualitas layanan publik terhadap masyarakat. Palsnya, kualitas pelayanan publik di sejumlah daerah dinilai masih rendah. "Kualitas layanan publik masih rendah. Kondisi birokrasi masih rumit, dan membuat tingkat kepuasan masyarakat pun menjadi rendah," jelas Asisten deputi koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik I, Kementrian PAN), Noviana Andrina kepada wartawan pada acara Training Sinergi Kampanye Reformasi Mental Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Praktisi Humas Pemerintah Daerah dan Jurnalis di Surabaya, Kamis (7/5/2015). Dikatakannya, pihaknya merasa prihatin dengan itu, sehingga kualitas layanan publik pun harus ditingkatkan. Pelayanan publik diatur UU No. 25/2009. Dalam hal itu masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan dan maklumat palayanan. "Inilah fingsinya reformasi pelayanan publik. Dalam hal itu humas paling berperan bagaimana memberikan informasi pada publik dengan baik," katanya. Diungkapkannya, ada

3 masalah besar dalam pembangunan di Indonesia. Yakni yang terkait, Birokrasi, Korupsi dan Infrastruktur. "Seperti halnya Birokrasi, itu masih gemuk lamban dan belum profesional, belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan investor," katanya. (Galamedia, & Mei 2015)

Siapa menteri Kabinet Kerja-nya Presiden Jokowi yang kinerjanya paling negatif? Jika itu ditanya pada PolcoMM Insitute, maka jawabannya adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Lalu siapa menteri yang kinerjanya paling memuaskan publik ? Institusi survei itu menjawab: Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. PolcoMM Insitute menyandarkan penilaian kinerja paling negatif itu dalam bingkai media massa selama enam bulan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla. "Pemberitaan negatif kepada menteri hukum dan HAM sebesar 6,7 persen," kata Direktur PolcoMM Institute, Heri Budianto, di Jakarta, Senin. Dia mengatakan, Laoly dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Partai Golkar serta dinilai kontroversial terhadap pemberian remisi kepada koruptor. Posisi berikutnya menurut dia adalah Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Purdijatno, sebesar 6,3 persen. "Pemberitaan dengan kinerja negatif ini lebih banyak soal pernyataan kontroversial soal kisruh KPK-Polri," ujarnya. Selanjutnya, kinerja menteri yang kurang memuaskan adalah Menteri ESDM, Sudirman Said, dengan persentase 4,1 persen. Said dianggap publik gagal mengendalikan soal BBM dan mafia migas. "Lalu Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto, memiliki prosentasi 3,1 persen karena dianggap pihak yang menjatuhkan presiden dengan partai pengusungnya," kata Budianto. Menteri BUMN, Rini Soemarno, menurut dia, juga menilai memiliki kinerja negatif yaitu

1,4 persen. Hal itu ujar dia disebabkan kinerja Soemarno dianggap negatif terkait pergantian direksi BUMN dan rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, yang ada di "ring 1". Sementara itu, menteri yang mendapatkan penilaian paling positif adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebesar 10,9 persen. Tidak lain karena penangkapan dan penenggelaman kapal ikan asing ilegal. "Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dinilai memiliki kinerja positif dengan prosentase 5,3 persen, terkait kinerjanya menunda kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Nasional," katanya. Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakir, dianggap positif dengan prosentase sebesar 4,7 persen karena dinilai berpihak pada TKI, memberikan sanksi bagi PJTKI brengsek, dan sertifikasi profesi. Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, juga dinilai publik memiliki kinerja positif dengan prosentase sebesar 3,1 persen. "Dia dianggap mumpuni mengatur penerbangan dan soal penataan bandara," ujarnya. Heri menjelaskan posisi berikutnya adalah Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, sebesar 2,1 persen. Jafar dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal serta perbatasan atau daerah terluar. "Lalu Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, dinilai positif karena pemberian kompensasi BBM dan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat," katanya. Survei itu dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.046 berita di media massa nasional. Metode riset yang digunakan adalah analisis kandungan berita dan *discourse analysis* dengan periode pemberitaan dari 6 Oktober 2015-April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015. (Galamedia, 11 Mei 2015)

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aa Umbara menilai, Pemda KBB harus segera mengganti sejumlah kepala dinas. Pasalnya, buruknya kinerja sejumlah dinas menjadi penyebab Pemda KBB kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ini masalah mental dan kinerja saja. Jika opini WDP itu persoalan asset, kenapa sudah tiga tahun tetap seperti ini? Saat sidang paripurna saja ngobrol, apalagi di kantor yang tidak terpantau oleh dewan. Saya belum bisa sebutkan dinasnya, karena tim di dewan sedang melakukan kajian," Papar Aa saat ditemui di Gedung Pemda KBB, Ngamprah, Rabu (3/6/2015). Jika tahun ini tidak ada perbaikan di jajaran eksekutif, lanjutnya, dewan pesimis tahun depan KBB mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Yang perlu diperbaiki itu perilaku dan mentalitas, kadang yang kerja, tapi ada juga yang hanya main-main. Komitmennya, kita saling meningkatkan kinerja baik di legislatif mau eksekutif, kita kerja bareng," paparnya. Aa menilai predikat WTP bukan hanya persoalan gengsi dan lebel. Menurutnya, WTP merupakan bukti bahwa sistem administrasi di KBB sudah sempurna tanpa pengecualian. "Idealnya kita sudah dapat WTP. Tapi ini juga ada keterkaitan dengan Pemda Kabupaten Bandung tentang penyerahan aset. Beberapa kali kita lakukan pertemuan ke induk tapi tidak ada hasilnya, padahal seharusnya Pemda yang menyerahkan ke kita. Kalau induk mendapat WTP ya kita akan protes," paparnya. (Galamedia, 3 Juni 2015)

Fenomena di atas juga didukung oleh penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Astika Dewi Fatmawati (2011) dalam skripsi berjudul "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan".

Andarias Patiran (2010) dalam jurnal berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)”.

Dari uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Bandung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana anggaran berbasis kinerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung
2. Bagaimana efektivitas pengendalian keuangan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung
3. Bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana anggaran berbasis kinerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana efektivitas pengendalian keuangan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung
4. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Dan untuk memenuhi salah satu tugas syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dan masukan bagi

instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

3. Bagi Institusi pendidikan

Memperoleh masukan tentang informasi mengenai kualifikasi sarjana yang dibutuhkan dunia kerja dalam rangka peningkatan mutu lulusannya, serta sebagai alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada sub bagian keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Tamansari No. 76 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukannya pada bulan Juli 2015 dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada bagian yang dijadikan sampel penelitian.